



DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah Students Association – Central Board)

Sekretariat: Jalan Menteng Raya No.62 Jakarta 10340 Telp: 081222275294

www.dpp-imm.or.id

dppimm1820@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAKLUMAT DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
TENTANG
KRISIS KEBANGSAAN MUTAKHIR
Nomor: 001/A-5/2026

Dalam beberapa waktu terakhir, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mencermati secara kritis lanskap krisis kebangsaan yang kian menebal di tengah proyek pembangunan nasional yang dipacu dalam logika akselerasi. Di balik narasi pertumbuhan, efisiensi, dan modernisasi, tersimpan sejumlah persoalan struktural yang justru memperlihatkan gejala kemunduran demokrasi, pelemahan kontrol publik, serta meningkatnya jarak antara negara dan kepentingan rakyat.

DPP IMM memandang bahwa orientasi pembangunan yang terlalu bertumpu pada ambisi percepatan, tanpa diimbangi keberpihakan sosial dan tata kelola demokratis, telah melahirkan berbagai kontradiksi. Alih-alih menghadirkan keadilan sosial, sejumlah kebijakan justru memperlihatkan kecenderungan sentralistik, minim partisipasi publik, dan rentan mengorbankan kepentingan masyarakat sipil.

Atas dasar itu, DPP IMM menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji secara serius melalui analisis kritis sebagai berikut:

1. DPP IMM menyoroti kegagalan sistemik dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Pada prinsipnya, DPP IMM mendukung program MBG sebagai upaya strategis negara dalam memperbaiki kualitas gizi nasional. Namun, pelaksanaannya justru memperlihatkan problem serius dalam tata kelola: berjalan sporadis, minim transparansi, serta lemah dalam pengawasan publik. Situasi ini juga menunjukkan inkonsistensi pemerintah terhadap semangat efisiensi anggaran yang selama ini dikampanyekan, sebab alokasi dana ratusan triliun rupiah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Di tengah berbagai persoalan tersebut, DPP IMM juga mengkritik kebijakan pengadaan 21.800 motor listrik impor untuk operasional MBG dengan nilai anggaran mencapai Rp1,05 triliun, yang dinilai tidak sensitif terhadap prioritas utama program serta berpotensi memperbesar pemborosan anggaran negara. Di berbagai daerah, program ini malah memunculkan persoalan baru seperti tingginya kasus keracunan, buruknya standar distribusi makanan, hingga dugaan praktik dapur fiktif yang mengindikasikan penyimpangan anggaran. Karena itu, DPP IMM menilai Kepala BGN gagal memastikan tata kelola MBG berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak sekadar menghadapi persoalan teknis administratif, melainkan telah memasuki krisis kredibilitas yang serius dan rentan menjadi ruang korupsi sistemik yang dibungkus atas nama kesejahteraan rakyat.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah Students Association – Central Board)

Sekretariat: Jalan Menteng Raya No.62 Jakarta 10340 Telp: 081222275294

www.dpp-imm.or.id dppimm1820@gmail.com

2. Terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), DPP IMM menilai program ini tidak lahir dari proses swadaya organik masyarakat, melainkan bentuk mobilisasi negara yang bersifat instruktif dan memaksa. Model implementasi seperti ini telah mencederai hakikat koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menempatkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berbasis sukarela, bukan berdasar proyek administratif negara. DPP IMM juga menyoroti penggunaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai landasan utama program yang dinilai problematik secara doktrinal, sebab instruksi presiden tidak memiliki daya ikat keluar layaknya peraturan perundang-undangan. Karena itu, maka pembentukan puluhan ribu koperasi secara serentak tanpa basis Undang-Undang dipandang sebagai bentuk pelampauan batas diskresi negara yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
3. DPP IMM mengutuk keras adanya infiltrasi manajerial negara melalui PT Agrinas serta pelatihan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui jalur Komponen Cadangan (Komcad) yang dinilai mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan pemberdayaan ekonomi sipil. Skema semacam ini memperlihatkan kecenderungan militerisasi ruang-ruang sipil secara halus melalui proyek ekonomi negara. Di sisi lain, model permodalan KDKMP yang bertumpu pada pinjaman Bank Himbara hingga Rp3 miliar per unit berpotensi menciptakan risiko utang sistemik yang mengancam solvabilitas desa di masa depan. Lebih jauh, penggunaan Dana Desa untuk menopang program ini juga rentan menimbulkan “kanibalisasi anggaran”, yakni tersedotnya alokasi dana yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dasar dan bantuan sosial masyarakat desa demi membiayai proyek negara yang belum tentu berkelanjutan.
4. Mengenai represi terhadap film dokumenter *Pesta Babi*, DPP IMM mengutuk segala bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F dan Pasal 28C. Keterlibatan aparat TNI dalam pembubaran forum sipil dan intimidasi terhadap panitia dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melampaui mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. DPP IMM juga mengecam birokrasi kampus yang bertindak sebagai agen sensor karena mencederai kebebasan akademik dan merusak marwah universitas sebagai ruang dialektika dan kritik yang sehat.

Berangkat dari akumulasi krisis kebangsaan yang rapuh, maka DPP IMM dengan ini menyatakan sikap:

1. Mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total Kepala BGN, termasuk membuka audit anggaran secara transparan dan menindak tegas seluruh praktik penyimpangan yang merugikan kepentingan rakyat. DPP IMM meminta KPK dan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap BGN yang dinilai banyak manipulasi.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah Students Association – Central Board)

Sekretariat: Jalan Menteng Raya No.62 Jakarta 10340 Telp: 081222275294

www.dpp-imm.or.id dppimm1820@gmail.com

2. Menolak segala bentuk praktik pembentukan KDKMP yang bersifat instruktif, manipulatif dan tidak berlandaskan prinsip koperasi yang demokratis dan partisipatif.
3. Mengecam praktik militerisasi ruang sipil melalui keterlibatan institusi pertahanan dalam proyek-proyek ekonomi dan sosial masyarakat. Termasuk pelibatan Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengelolaan KDKMP, karena berpotensi mengancam demokrasi sipil dan otonomi masyarakat desa.
4. Mengutuk segala bentuk represi, intimidasi, dan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi serta kebebasan akademik, termasuk intervensi aparat dan birokrasi kampus terhadap forum intelektual dan karya kebudayaan kritis.
5. Menginstruksikan kepada seluruh kader IMM di semua level kepemimpinan untuk melakukan konsolidasi dan kajian mendalam, serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial, supremasi hukum, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Jakarta, 29 Zulkaidah 1447 H

17 Mei 2026 M

Ketua Umum,

Riyan Betra Delza

NIA: 07.23.03

PIMPINAN



Sekretaris Jenderal,

M. Zaki Mubarak

NIA: 07.23.09